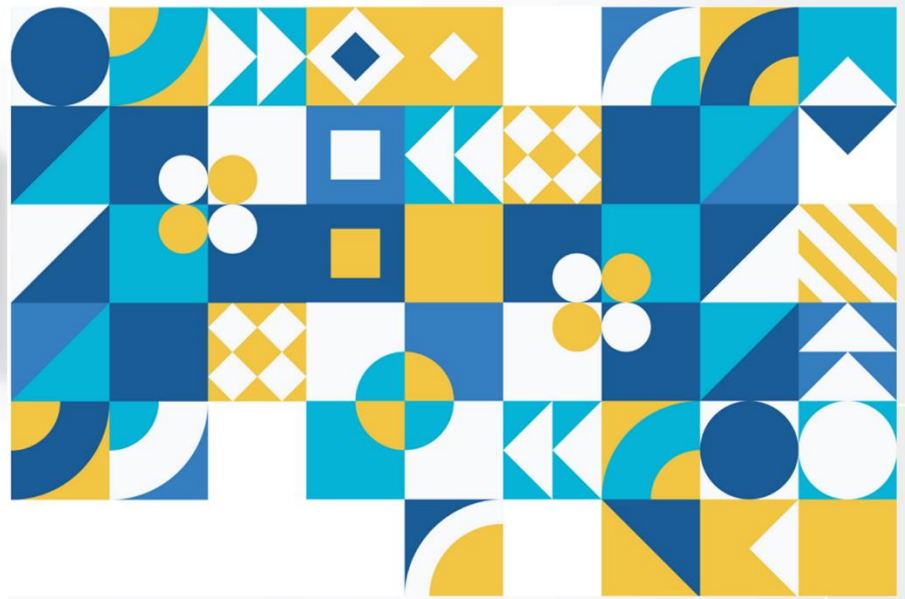




**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**



# **EVALUASI RENJA Tahun 2023**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya sehingga penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Tahun 2023 Bappeda Provinsi Lampung dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Tahun 2021 ini dibuat sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan ini, untuk itu kritik dan saran untuk penyempurnaan sangat diharapkan. Semoga Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Tahun 2023 ini dapat bermanfaat dan menjadi tolak ukur perbaikan kinerja BAPPEDA Provinsi Lampung di masa yang akan datang.

**KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH,**

**ELVIRA UMIHANNI, S.P., M.T.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19730525 199703 2 002

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai dengan DPA Tahun 2023, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Perubahan Provinsi Lampung T.A. 2023, alokasi anggaran BAPPEDA Provinsi Lampung sebesar Rp. 38.197.101.261,- terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp.36.980.050.261,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 1.217.051.000,-. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 18.895.712.516,- dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 18.084.337.745,-.

Pada Tahun 2023, BAPPEDA melaksanakan 3 Program, 15 Kegiatan dan 57 Sub Kegiatan yang terbagi kedalam 2 Sasaran Utama dan 1 Sasaran Pendukung. Untuk 2 Sasaran Utama terdiri 2 program, 7 kegiatan dan 37 sub kegiatan dengan total anggaran Rp.8.429.073.710,- dengan realisasi sebesar Rp.8.130.201.950,- atau 96,45% dan 1 Sasaran Pendukung terdiri dari 1 program, 8 kegiatan, dan 20 sub kegiatan dengan total anggaran Rp.29.768.027.551,- dengan realisasi sebesar Rp.27.971.181.516,- atau 93,96%. Secara keseluruhan persentase antara pagu anggaran dan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar 94,51%. Adapun realisasi kinerja BAPPEDA Tahun 2023 mencapai 100%.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Tabel T-E.1. tentang Skala Nilai Peringkat Kinerja, maka kinerja BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2023 berada pada interval nilai realisasi kinerja  $91\% \leq 100\%$  dan masuk dalam kriteria nilai **“sangat tinggi”**.

# DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>ii</b>
<b>Ringkasan Eksekutif</b> .....	<b>iii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>iv</b>
<b>Daftar Tabel dan Daftar Gambar</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	2
1.4 Sistematika Penulisan.....	3
<b>BAB II. PERSANDINGAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RENJA DENGAN RENSTRA</b> .....	<b>7</b>
2.1 Cascading Tujuan dan Sasaran beserta Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra sampai pada Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan .....	7
2.2 Kesesuaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan antara Renja dan Renstra .....	14
2.3 Perbandingan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Pagu Pendanaan, Indikator dan Target Kinerja antara Renja Dan Renstra .....	18
2.4 Perbandingan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Pagu Pendanaan, Indikator dan Target Kinerja antara Renja dan DPA .....	25
<b>BAB III. CAPAIAN KINERJA</b> .....	<b>33</b>
3.1 Realisasi Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Anggaran Rencana Kerja Bappeda Tahun 2023 .....	33
3.2 Capaian Kinerja IKU Bappeda (Sasaran Renstra) Tahun 2023 .....	42
<b>BAB IV. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI</b> .....	<b>51</b>
4.1 Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja .....	51
4.2 Faktor Pendorong Keberhasilan Pencapaian Kinerja .....	51
4.3 Rekomendasi Kebijakan .....	52
<b>BAB V. PENUTUP</b> .....	<b>53</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1</b>	Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja.....	8
<b>Tabel 2.2</b>	Kesesuaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan antara Renja dengan Renstra Bappeda Provinsi Lampung .....	14
<b>Tabel 2.3</b>	Perbandingan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Pagu Pendanaan, Indikator dan Target Kinerja antara Renja dan Renstra Bappeda Provinsi Lampung .....	19
<b>Tabel 2.4</b>	Perbandingan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Pagu Pendanaan, Indikator dan Target Kinerja antara Renja dan DPA Bappeda Provinsi Lampung.....	26
<b>Tabel 3.1</b>	Capaian IKU BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2023....	42
<b>Tabel 3.2</b>	Capaian Indikator Sasaran (IKU) RPJMD.....	48

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1</b>	Indikator Kinerja BAPPEDA 2019-2024.....	7
<b>Gambar 2.2</b>	Pohon Kinerja BAPPEDA.....	9
<b>Gambar 2.3</b>	Alokasi Anggaran BAPPEDA Tahun 2023.....	10
<b>Gambar 2.4</b>	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Sasaran Pendukung.....	11
<b>Gambar 2.5</b>	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Sasaran Utama 1.....	12
<b>Gambar 2.6</b>	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Sasaran Utama 2.....	13
<b>Gambar 2.7</b>	Pendanaan antara Renja dan DPA Tahun 2023.....	25
<b>Gambar 3.1</b>	Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023.....	33

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dokumen Evaluasi Renja merupakan dokumen laporan hasil pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Penyusunan dokumen evaluasi renja Perangkat Daerah ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pencapaian target sasaran, target rencana program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Renja Perangkat Daerah, serta untuk memastikan bahwa program, kegiatan dan subkegiatan dalam Renja telah menjadi pedoman dalam penyusunan DPA dan telah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.

Memperhatikan tugas dan fungsi BAPPEDA sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung, Bappeda Provinsi Lampung mempunyai tugas membantu Gubernur Lampung dalam melaksanakan fungsi penunjang di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berkenaan dengan hal tersebut, selain menjadi unsur penunjang dalam bidang perencanaan pembangunan daerah secara umum yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di BAPPEDA Provinsi Lampung secara umum yang disusun dalam dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD), pengendalian, monitoring dan evaluasi rencana pembangunan daerah, BAPPEDA Provinsi Lampung sebagai perangkat daerah juga menyusun dokumen Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang memuat informasi tentang realisasi kinerja dan anggaran dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan di tingkat perangkat daerah yang telah

dilaksanakan pada tahun 2023, serta keterkaitannya dengan capaian dari sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda Tahun 2019-2024.

## **1.2 Dasar Hukum**

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023.

## **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Dokumen Evaluasi Rencana Kerja BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2023 adalah sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023.

Selaras dengan hal itu, tujuan disusunnya dokumen Evaluasi Renja BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2023 adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja dan keuangan pada pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan Tahun 2023. Disamping itu, dokumen evaluasi Renja ini juga disusun sebagai upaya untuk memastikan bahwa program, kegiatan dan subkegiatan dalam Renja telah menjadi pedoman dalam penyusunan DPA Perangkat Daerah, serta untuk memastikan bahwa Renja Perangkat Daerah telah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah. Dokumen evaluasi Renja ini juga disusun sebagai bahan pertimbangan dan penyusunan dokumen Renja Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2025.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Evaluasi Rencana Kerja Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2023 disusun sebagaimana surat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor 000.7.2/350/VI.01/2024 Tanggal 29 Januari 2024 Perihal Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 2023 sebagai berikut :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Evaluasi Renja Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2023, proses penyusunan Evaluasi Renja, keterkaitan antara Renja Bappeda dengan DPA dan Renstra Bappeda.

#### **1.2 Dasar Hukum**

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya, kewenangan serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

#### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Evaluasi Renja Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2023.



#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Evaluasi Renja Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2023 serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II. PERSANDINGAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RENJA DENGAN RENSTRA BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG**

### **2.1 Cascading Tujuan dan Sasaran beserta Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Bappeda sampai pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Berisikan Cascading dari RPMJD Provinsi Lampung sampai dengan Renstra BAPPEDA, Pohon Kinerja serta program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Bappeda Provinsi Lampung pada tahun 2023.

### **2.2 Kesesuaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan antara Renja dan Renstra**

Menguraikan kesesuaian program, kegiatan, sub kegiatan, pagu pendanaan, Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 dengan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

### **2.3 Perbandingan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Pagu Pendanaan, Indikator dan Target Kinerja antara Renja dan Renstra**

Membandingkan antara program kegiatan, sub kegiatan, pagu pendanaan, indikator dan target kinerja dalam Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 dengan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

#### **2.4 Perbandingan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Pagu Pendanaan, Indikator dan Target Kinerja antara Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)**

Membandingkan antara program kegiatan, sub kegiatan, pagu pendanaan, indikator dan target kinerja dalam Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2023.

### **BAB III. CAPAIAN KINERJA BAPPEDA PROV. LAMPUNG TAHUN 2022**

#### **3.1 Realisasi Pencapaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Anggaran Renja Bappeda Tahun 2023**

Menguraikan tentang capaian kinerja keuangan dan kinerja output sub kegiatan dibandingkan dengan target Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023.

#### **3.2 Capaian Kinerja IKU Bappeda (Sasaran Renstra) Tahun 2023**

Mengemukakan capaian dan realisasi berdasarkan sasaran dan indikator sasaran strategis Bappeda Provinsi Lampung tahun 2023.

### **BAB IV. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN**

#### **4.1. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja**

Menguraikan faktor-faktor yang menghambat upaya pencapaian target kinerja.

#### **4.2. Faktor Pendorong Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

Menguraikan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya target kinerja.

#### **4.3. Rekomendasi Kebijakan**

Menguraikan rencana tindak lanjut dalam pemecahan hambatan tersebut.

## **BAB V. PENUTUP**

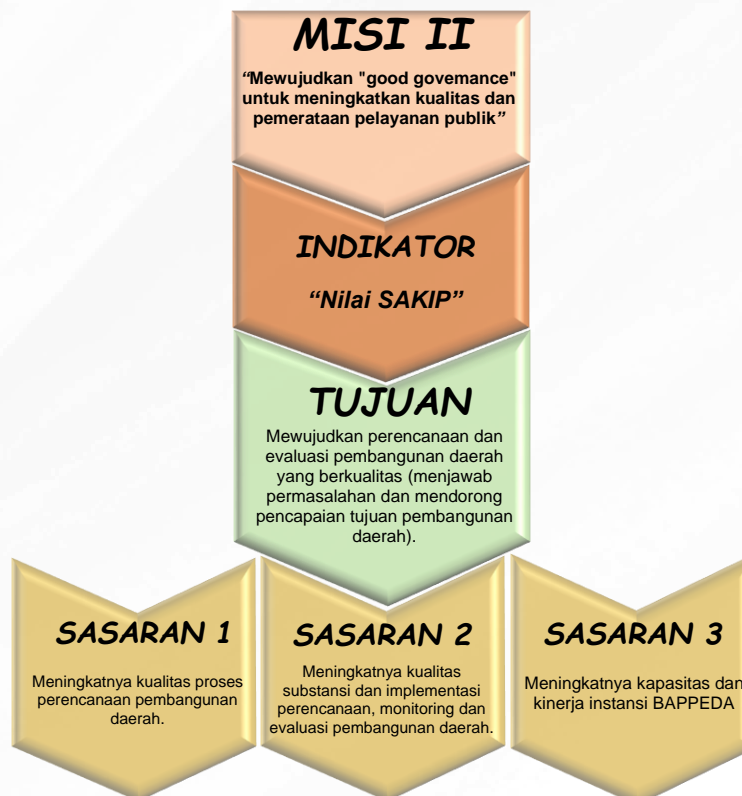
Menguraikan kesimpulan dari penyusunan dokumen Evaluasi Renja BAPPEDA Tahun 2023.

## BAB II

# PERSANDINGAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RENJA DENGAN RENSTRA BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG

### 2.1 Cascading Tujuan dan Sasaran beserta Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra BAPPEDA sampai pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Mengacu pada Visi “Rakyat Lampung Berjaya” dan 6 (enam) Misi RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, BAPPEDA sebagai unsur Penunjang Pemerintahan urusan Perencanaan mendukung pencapaian Misi ke-2 yaitu “Mewujudkan *good governance* untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik” dengan Sasaran RPJMD yaitu “Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah”.

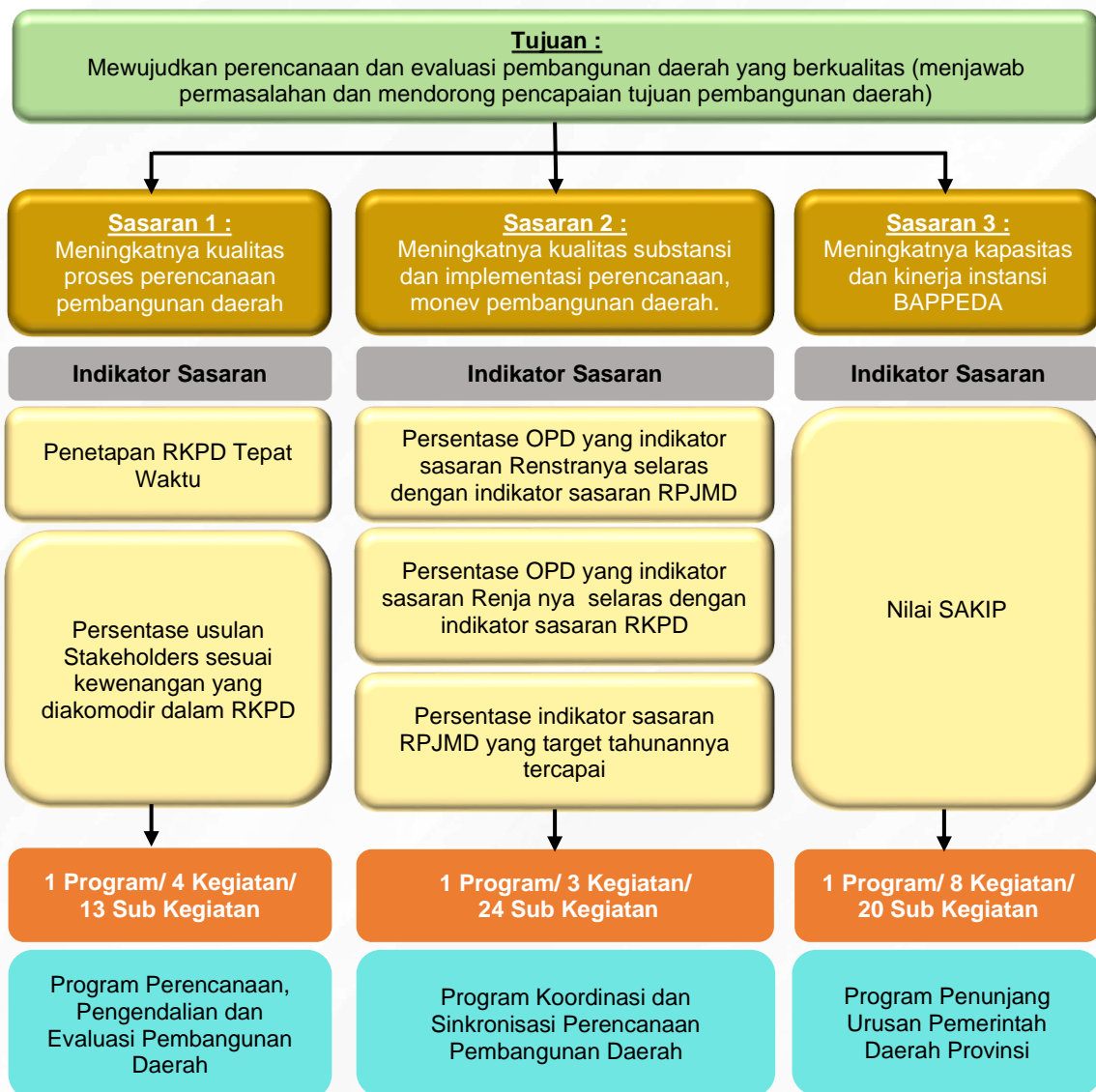


Gambar 2.1 : Indikator Kinerja Bappeda 2019-2024

Dalam rangka menciptakan akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang selaras dengan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dicapai, sebagaimana dijabarkan pada Tabel berikut :

**Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Mewujudkan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas (menjawab permasalahan dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah).	Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah.	Penetapan RKPD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
			Persentase usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD;	30%	30%	30%	31%	32%
		Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.	Persentase OPD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD;	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase OPD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD;	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai.	80%	85%	90%	95%	95%
		Meningkatnya kapasitas dan kinerja instansi BAPPEDA	Nilai SAKIP	BB	BB	BB	A	A



**Gambar 2.2 Pohon Kinerja BAPPEDA**

Dalam rangka mendukung capaian kinerja yang telah ditetapkan, pada Tahun 2023 Bappeda Provinsi Lampung melaksanakan **3 Program, 15 Kegiatan**, dan **57 Sub Kegiatan** sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023, dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023.

Total alokasi anggaran murni Bappeda Provinsi Lampung pada Tahun 2023 adalah sebesar **Rp. 36.828.707.318,35,-** (Tiga Puluh Enam Milyar Delapan Ratus

Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Koma Tiga Puluh Lima Rupiah) yang terdiri dari:

- Belanja Operasi : Rp. 36.398.719.718,35,-
- Belanja Modal : Rp. 429.987.600,00,-
- Total : Rp. 36.828.707.318,35,-**

Lebih lanjut, dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Provinsi Lampung T.A. 2023, dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Perubahan Provinsi Lampung T.A. 2023, Bappeda Provinsi Lampung melaksanakan **3 Program, 15 Kegiatan, dan 57 Sub Kegiatan** dengan total alokasi anggaran perubahan pada Tahun 2023 sebesar **Rp. 38.197.101.261,-** (Tiga Puluh Delapan Milyar Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Satu Ribu Dua Ratus Enam Puluh Satu Rupiah) yang terdiri dari :

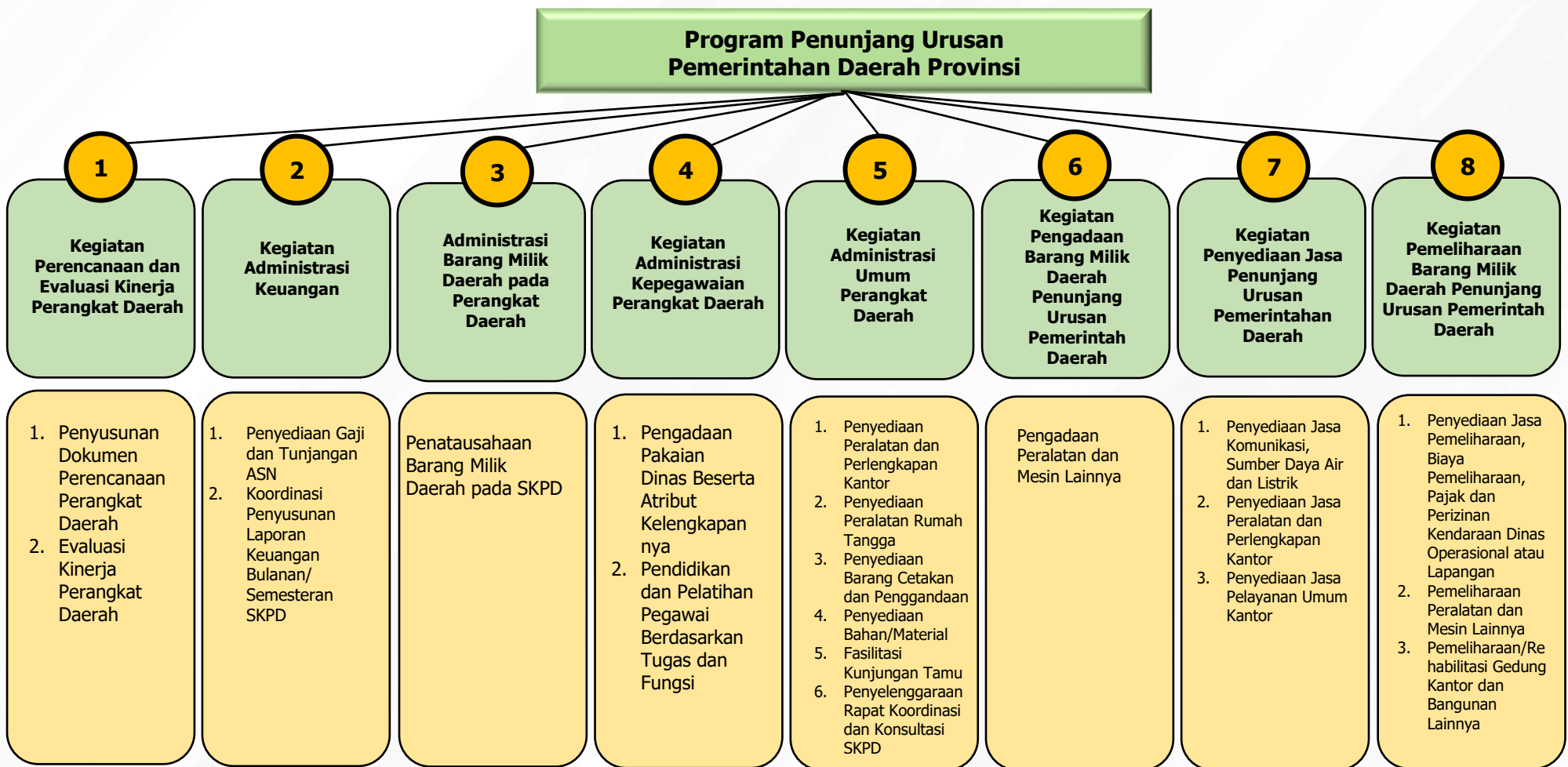
- Belanja Operasi : Rp. 36.980.050.261,-
- Belanja Modal : Rp. 1.217.051.000,-
- Total : Rp. 38.197.101.261,-**

Adapun struktur belanja APBD Bappeda Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:



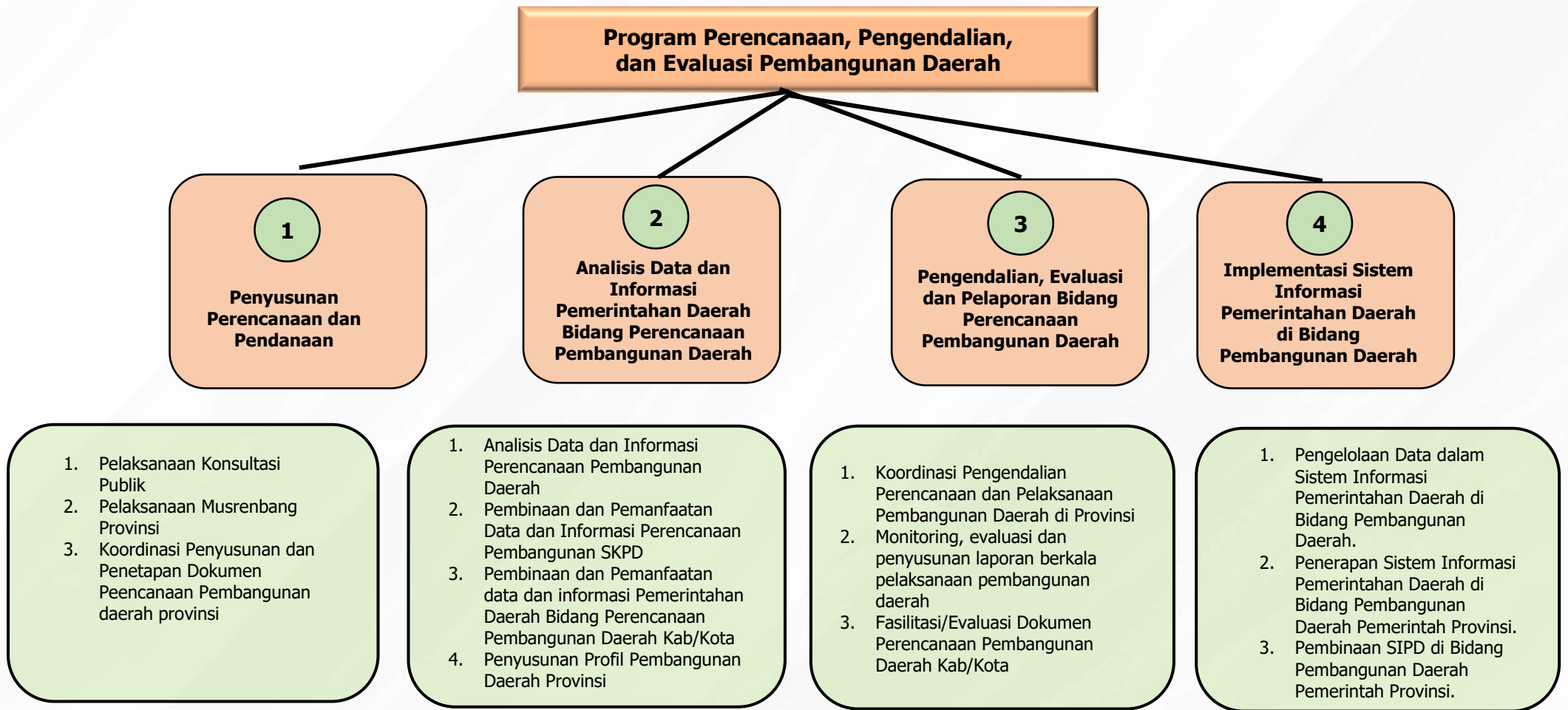
**Gambar 2.3 : Alokasi Anggaran BAPPEDA Tahun 2023**

Rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh BAPPEDA Provinsi Lampung tahun 2023 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



**Gambar 2.4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Sasaran Pendukung**





**Gambar 2.5 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Sasaran Utama 1**

## Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

1

### Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

2

### Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

3

### Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

**Gambar 2.6 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Sasaran Utama 2**

## 2.2 Kesesuaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan antara Renja dan Renstra

Untuk mendukung Misi ke-2 dari RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 terdapat 2 Sasaran Strategis dan 1 Sasaran Pendukung dalam Renstra 2019-2024 BAPPEDA Provinsi Lampung yang diimplementasikan kedalam 3 Program, 15 Kegiatan dan 57 Sub Kegiatan. Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2023 terdapat dalam matrik program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada dalam Dokumen Rencana Strategis BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Konsistensi Program, Kegiatan dan sub kegiatan antara RPJMD, RKPD dan Renstra diperkuat dengan adanya aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (SIPPKD) Provinsi Lampung.

**Tabel 2.2 Kesesuaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan antara Renja dengan Renstra Bappeda Provinsi Lampung**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN RENSTRA 2019-2024	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN RENJA TAHUN 2023	KETERANGAN/ STATUS
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>SASARAN UTAMA</b>			
<b>A</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>		
<b>I</b>	<b>Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>		
1	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Konsisten
2	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Konsisten
3	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Konsisten
<b>II</b>	<b>Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		
4	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Konsisten
5	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Konsisten
6	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Konsisten
7	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Konsisten
<b>III</b>	<b>Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN RENSTRA 2019-2024	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN RENJA TAHUN 2023	KETERANGAN/ STATUS
(1)	(2)	(3)	(4)
8	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Konsisten
9	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Konsisten
10	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Konsisten
<b>IV.</b>	<b>Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</b>		
11	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Konsisten
12	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Konsisten
13	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Konsisten
<b>B</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>		
<b>V</b>	<b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>		
14	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Konsisten
15	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Konsisten
16	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Konsisten
17	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Konsisten
18	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Konsisten
19	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Konsisten
20	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Konsisten

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN RENSTRA 2019-2024</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN RENJA TAHUN 2023</b>	<b>KETERANGAN/ STATUS</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
21	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Konsisten
<b>VI</b>	<b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>		
22	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Konsisten
23	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Konsisten
24	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Konsisten
25	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Konsisten
26	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Konsisten
27	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Konsisten
28	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Konsisten
29	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Konsisten
<b>VII</b>	<b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>		
30	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Konsisten
31	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Konsisten
32	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Konsisten

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN RENSTRA 2019-2024	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN RENJA TAHUN 2023	KETERANGAN/ STATUS
(1)	(2)	(3)	(4)
33	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Konsisten
34	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Konsisten
35	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Konsisten
36	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Konsisten
37	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Konsisten
<b>SASARAN PENDUKUNG</b>			
<b>C</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>		
<b>VIII</b>	<b>Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		
38	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Konsisten
39	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Konsisten
<b>IX</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan</b>		
40	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Konsisten
41	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD	Konsisten
<b>X</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		
42	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Konsisten
<b>XI</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		
43	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Konsisten
44	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Konsisten
<b>XII</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		
45	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Konsisten
46	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Konsisten

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN RENSTRA 2019-2024	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN RENJA TAHUN 2023	KETERANGAN/ STATUS
(1)	(2)	(3)	(4)
47	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Konsisten
48	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	Konsisten
49	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Konsisten
50	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Konsisten
<b>XIII</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		
51	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Konsisten
<b>XIV</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		
52	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Konsisten
53	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Konsisten
54	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Konsisten
<b>XV</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		
55	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Konsisten
56	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Konsisten
57	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Konsisten

### 2.3 Perbandingan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Pagu Pendanaan, Indikator dan Target Kinerja antara Renja dan Renstra

Perencanaan Pembangunan di Provinsi Lampung Tahun 2023 merupakan tahun ke-4 Periode RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dan Renstra Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Secara rinci perbandingan program, kegiatan, sub kegiatan, pagu pendanaan, indikator dan target kinerja antara Renja dan Renstra 2019-2024 Bappeda Provinsi Lampung tahun 2023 dapat dilihat di tabel berikut :

**Tabel 2.3 Perbandingan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Pagu Pendanaan, Indikator dan Target Kinerja antara Renja dan Renstra Bappeda Provinsi Lampung**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENJA		RENSTRA	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>SASARAN UTAMA</b>						
<b>1</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Tingkat kesesuaian data, dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>4.228.526.884</b>	<b>100%</b>	<b>5.445.398.310</b>
<b>1</b>	<b>Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>2.163.371.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.682.000.000</b>
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah berita acara konsultasi publik	1 Berita Acara	1.192.116.000	1 Berita Acara	220.000.000
	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah berita acara Musrenbang Provins	1 Berita Acara	255.085.400	1 Berita Acara	517.000.000
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi yang ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/ RKPD)	4 Dokumen	716.169.600	2 Dokumen	945.000.000
<b>2</b>	<b>Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan</b>	<b>100%</b>	<b>1.124.856.942</b>	<b>100%</b>	<b>1.872.228.400</b>
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah masukan analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah (semua perencanaan pembangunan daerah)	3 Masukan	159.272.000	3 Masukan	222.028.400
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi	75 Orang	311.448.000	75 Orang	605.000.000
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya manusia Pemerintah Kabupaten/ Kota yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi Pemerintahan Daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	60 Orang	196.270.000	60 Orang	238.700.000
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil pembangunan daerah yang diterbitkan	2 Buku	457.866.942	2 Buku	806.500.000
<b>3</b>	<b>Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase capaian kinerja pembangunan daerah di OPD dan Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>772.001.342</b>	<b>100%</b>	<b>1.591.169.190</b>
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	2 Laporan	60.321.300	2 Laporan	326.205.990
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	3 Laporan	484.150.000	2 Laporan	708.125.000
	Fasilitasi/ Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten/ Kota yang difasilitasi/ evaluasi	3 Dokumen	227.530.042	3 Dokumen	556.838.920



NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENJA		RENSTRA	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	<b>Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase capaian kinerja pembangunan daerah di OPD dan Kabupaten/Kota</b>	100%	168.297.600	100%	300.000.000
	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang dikelola	1 Dokumen	127.560.000	1 Dokumen	100.000.000
	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	27.654.600	1 Dokumen	100.000.000
	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	1 Dokumen	13.083.000	1 Dokumen	100.000.000
II	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan money pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah</b>	100%	3.549.702.426	100%	7.539.090.460
5	<b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia</b>	100%	1.537.384.942	100%	2.160.160.000
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	41.170.200	1 Dokumen	355.850.000
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pemerintahan	10 Perangkat Daerah	105.471.800	10 Perangkat Daerah	199.650.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pemerintahan	10 Perangkat Daerah	117.753.800	10 Perangkat Daerah	222.750.000
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan	454.155.000	1 Laporan	331.850.000
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	280.994.000	1 Dokumen	404.910.000

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENJA		RENSTRA	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pembangunan Manusia	6 Perangkat Daerah	173.800.000	6 Perangkat Daerah	199.650.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pembangunan Manusia	6 Perangkat Daerah	154.688.200	6 Perangkat Daerah	222.750.000
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Kesejahteraan Rakyat	2 Laporan	209.351.942	1 Laporan	227.750.000
<b>6</b>	<b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan bidang perekonomian dan SDA</b>	<b>100%</b>	<b>749.875.542</b>	<b>100%</b>	<b>2.326.465.460</b>
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	172.370.142	1 Dokumen	404.877.110
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Perekonomian	5 Perangkat Daerah	46.315.800	5 Perangkat Daerah	339.105.140
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Perekonomian	5 Perangkat Daerah	66.710.400	5 Perangkat Daerah	328.955.880
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	125.360.000	1 Laporan	154.672.540
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang SDA yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	88.744.000	1 Dokumen	196.850.500
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang SDA	4 Perangkat Daerah	138.688.200	4 Perangkat Daerah	187.440.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang SDA	4 Perangkat Daerah	66.560.000	4 Perangkat Daerah	395.323.500
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	45.127.000	1 Laporan	319.240.790
<b>7</b>	<b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>100%</b>	<b>1.262.441.942</b>	<b>100%</b>	<b>3.052.465.000</b>

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENJA		RENSTRA	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	1 Dokumen	409.257.000	1 Dokumen	628.368.600
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Infrastruktur	4 Perangkat Daerah	217.500.000	4 Perangkat Daerah	165.000.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Infrastruktur	4 Perangkat Daerah	26.840.000	4 Perangkat Daerah	222.750.000
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPd/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	26.981.000	1 Laporan	199.650.000
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Kewilayahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	1 Dokumen	329.727.000	1 Dokumen	690.650.000
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Kewilayahan	5 Perangkat Daerah	97.874.000	5 Perangkat Daerah	199.650.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Kewilayahan	5 Perangkat Daerah	24.814.942	5 Perangkat Daerah	222.750.000
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPd/ RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 Laporan	129.448.000	1 Laporan	723.646.400
<b>SASARAN PENDUKUNG</b>						
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>29.628.871.951</b>	<b>100%</b>	<b>21.120.336.653</b>
<b>8</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>1.811.812.350</b>	<b>100%</b>	<b>646.773.600</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	13 Dokumen	1.709.324.550	11 Dokumen	388.507.900
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 Laporan	102.487.800	7 Laporan	258.265.700
<b>9</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan dokumen Keuangan yang tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>18.528.968,479</b>	<b>100%</b>	<b>16.607.611.800</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	115 Orang	18.434.841.479	115 Orang	16.494.945.400

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENJA		RENSTRA	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	2 Laporan	94.127.000	2 Laporan	112.666.400
<b>10</b>	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan dokumen kebutuhan barang dan aset yang tepat waktu	<b>100 %</b>	<b>48.721.692</b>	<b>100%</b>	<b>60.500.000</b>
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	3 Laporan	48.721.692	3 Laporan	60.500.000
<b>11</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase peningkatan kompetensi ASN Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>468.375.000</b>	<b>100%</b>	<b>297.391.040</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	314 Paket	243.125.000	130 Paket	132.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	90 Orang	225.250.000	30 Orang	165.391.040
<b>12</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Layanan administrasi umum perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>6.103.927.930</b>	<b>100%</b>	<b>868.687.446</b>
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Paket	258.868.840	12 Paket	350.000.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12 Paket	33.984.400	12 Paket	11.000.0000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	31.068.000	12 Paket	22.000.000
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	12 Paket	35.000.750	12 Paket	33.039.985
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 Laporan	188.100.000	1 Laporan	66.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	5.556.905.940	1 Laporan	386.647.461
<b>13</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan barang penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>175.549.600</b>	<b>100%</b>	<b>141.900.000</b>
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	117 Unit	175.549.600	25 Unit	141.900.000
<b>14</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Layanan Jasa Penunjang perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>1.748.848.650</b>	<b>100%</b>	<b>1.477.373.800</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan	352.960.000	1 Laporan	466.400.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Laporan	66.675.000	1 Laporan	55.000.000

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENJA		RENSTRA	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	1.329.213.650	1 Laporan	955.973.800
<b>15</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>742.668.250</b>	<b>100%</b>	<b>1.020.098.967</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	14 Unit	493.938.000	14 Unit	350.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	325 Unit	27.800.000	250 Unit	44.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 Unit	220.930.250	3 Unit	626.098.967
<b>TOTAL</b>				<b>37.407.101.261</b>		<b>34.104.825.423</b>

Pada Tahun 2023, pagu anggaran BAPPEDA Provinsi Lampung berdasarkan Renstra 2019-2024 adalah sebesar Rp.34.104.825.423,- sementara pagu anggaran berdasarkan Renja Perubahan Tahun 2023 sebesar Rp.37.407.101.261,-. Terdapat selisih sebesar Rp.3.302.275.838,-. Peningkatan yang signifikan terdapat pada sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, dimana pagu anggaran sub kegiatan tersebut di Renstra sebesar Rp.386.647.461,- sementara di Renja Perubahan sebesar Rp.5.556.905.940,-.

#### **2.4 Perbandingan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Pagu Pendanaan, Indikator dan Target Kinerja antara Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)**

Pada Tahun 2023, pagu anggaran belanja pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan BAPPEDA Provinsi Lampung sebesar Rp.38.197.101.261,- sementara dalam Renja Perubahan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam RKPD Perubahan Provinsi Lampung Tahun 2023 sebesar Rp.37.407.101.261,-. Terdapat selisih sebesar Rp.790.000.000,-.



**Gambar 2.7 Pendanaan antara Renja dan DPA Tahun 2023**

Secara rinci perbandingan program, kegiatan, sub kegiatan, pagu pendanaan, indikator dan target kinerja antara Renja dan DPA Perubahan Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2023 dapat dilihat di tabel berikut :

**Tabel 2.4 Perbandingan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Pagu Pendanaan, Indikator dan Target Kinerja antara Renja dan DPA Bappeda Provinsi Lampung**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENJA PERUBAHAN		DPA PERUBAHAN	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>SASARAN UTAMA</b>						
<b>I</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Tingkat kesesuaian data, dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>4.228.526.884</b>	<b>100%</b>	<b>4.397.158.884</b>
<b>1</b>	<b>Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>2.163.371.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.968.138.700</b>
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah berita acara konsultasi publik	1 Berita Acara	1.192.116.000	1 Bahan Berita	370.339.600
	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah berita acara Musrenbang Provinsi	1 Berita Acara	255.085.400	1 Bahan Berita	253.354.400
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi yang ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/ RKPD)	4 Dokumen	716.169.600	4 Dokumen	1.339.444.700
<b>2</b>	<b>Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan</b>	<b>100%</b>	<b>1.124.856.942</b>	<b>100%</b>	<b>1.372.286.942</b>
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah masukan analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah (semua perencanaan pembangunan daerah)	3 Masukan	159.272.000	3 Masukan	269.208.000
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi	75 Orang	311.448.000	45 Orang	311.448.000
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya manusia Pemerintah Kabupaten/ Kota yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi Pemerintahan Daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	60 Orang	196.270.000	40 Orang	196.270.000

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENJA PERUBAHAN		DPA PERUBAHAN	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil pembangunan daerah yang diterbitkan dan Dokumen Satu Data Indonesia (SDI)	2 Buku	457.866.942	2 Buku	595.360.942
<b>3</b>	<b>Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase capaian kinerja pembangunan daerah di OPD dan Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>772.001.342</b>	<b>100%</b>	<b>893.435.642</b>
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	2 Laporan	60.321.300	2 Laporan	53.938.142
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	3 Laporan	484.150.000	3 Laporan	586.699.500
	Fasilitasi/ Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten/ Kota yang difasilitasi/ evaluasi	3 Dokumen	227.530.042	3 Dokumen	252.798.000
<b>4</b>	<b>Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase capaian kinerja pembangunan daerah di OPD dan Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>168.297.600</b>	<b>100%</b>	<b>168.297.600</b>
	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang dikelola	1 Dokumen	127.560.000	1 Dokumen	127.560.000
	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	27.654.600	1 Dokumen	27.654.600
	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	1 Dokumen	13.083.000	1 Dokumen	13.083.000
<b>II</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>3.549.702.426</b>	<b>100%</b>	<b>4.031.914.826</b>



NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENJA PERUBAHAN		DPA PERUBAHAN	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	<b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia</b>	<b>100%</b>	<b>1.537.384.942</b>	<b>100%</b>	<b>1.624.486.942</b>
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	41.170.200	1 Dokumen	41.170.200
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pemerintahan	10 Perangkat Daerah	105.471.800	10 Perangkat Daerah	105.471.800
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pemerintahan	10 Perangkat Daerah	117.753.800	10 Perangkat Daerah	298.163.800
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan	454.155.000	4 Laporan	360.847.000
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	280.994.000	1 Dokumen	280.994.000
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pembangunan Manusia	6 Perangkat Daerah	173.800.000	6 Perangkat Daerah	173.800.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pembangunan Manusia	6 Perangkat Daerah	154.688.200	6 Perangkat Daerah	154.688.200

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENJA PERUBAHAN		DPA PERUBAHAN	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Kesejahteraan Rakyat	2 Laporan	209.351.942	1 Laporan	209.351.942
<b>5</b>	<b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan bidang perekonomian dan SDA</b>	<b>100%</b>	<b>749.875.542</b>	<b>100%</b>	<b>871.529.942</b>
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	172.370.142	2 Dokumen	172.370.142
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Perekonomian	5 Perangkat Daerah	46.315.800	5 Perangkat Daerah	93.776.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Perekonomian	5 Perangkat Daerah	66.710.400	5 Perangkat Daerah	66.710.400
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	125.360.000	1 Laporan	199.554.200
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang SDA yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	88.744.000	1 Dokumen	88.744.000
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang SDA	4 Perangkat Daerah	138.688.200	4 Perangkat Daerah	138.688.200
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang SDA	4 Perangkat Daerah	66.560.000	4 Perangkat Daerah	66.560.000
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	45.127.000	1 Laporan	45.127.000

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENJA PERUBAHAN		DPA PERUBAHAN	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	<b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>100%</b>	<b>1.262.441.942</b>	<b>100%</b>	<b>1.535.897.942</b>
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	409.257.000	2 Dokumen	509.261.000
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Infrastruktur	4 Perangkat Daerah	217.500.000	4 Perangkat Daerah	132.376.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Infrastruktur	4 Perangkat Daerah	26.840.000	4 Perangkat Daerah	26.840.000
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	26.981.000	1 Laporan	26.981.000
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Kewilayahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	329.727.000	1 Dokumen	416.903.000
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Kewilayahan	5 Perangkat Daerah	97.874.000	5 Perangkat Daerah	97.874.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Kewilayahan	5 Perangkat Daerah	24.814.942	5 Perangkat Daerah	24.814.942
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 Laporan	129.448.000	2 Laporan	300.848.000

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENJA PERUBAHAN		DPA PERUBAHAN	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>SASARAN PENDUKUNG</b>						
III	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>Persentase Layanan administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>29.628.871.951</b>	<b>100%</b>	<b>29.768.027.551</b>
7	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>1.811.812.350</b>	<b>100%</b>	<b>340.395.000</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	13 Dokumen	1.709.324.550	11 Dokumen	231.666.200
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 Laporan	102.487.800	6 Laporan	108.728.800
8	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan dokumen penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>18.528.968,479</b>	<b>100%</b>	<b>18.989.839.516</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	115 Orang	18.434.841.479	123 orang	18.895.712.516
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	2 Laporan	94.127.000	2 laporan	94.127.000
9	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan dokumen kebutuhan barang dan aset yang tepat waktu</b>	<b>100 %</b>	<b>48.721.692</b>	<b>100%</b>	<b>48.721.692</b>
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	3 Laporan	48.721.692	3 Laporan	48.721.692
10	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase peningkatan kompetensi ASN Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>468.375.000</b>	<b>100%</b>	<b>468.375.000</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	314 Paket	243.125.000	149 Paket	243.125.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	90 Orang	225.250.000	104 Orang	225.250.000
11	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Layanan administrasi umum perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>6.103.927.930</b>	<b>100%</b>	<b>6.775.265.590</b>
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Paket	258.868.840	12 Paket	928.759.440
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12 Paket	33.984.400	12 Paket	33.984.400

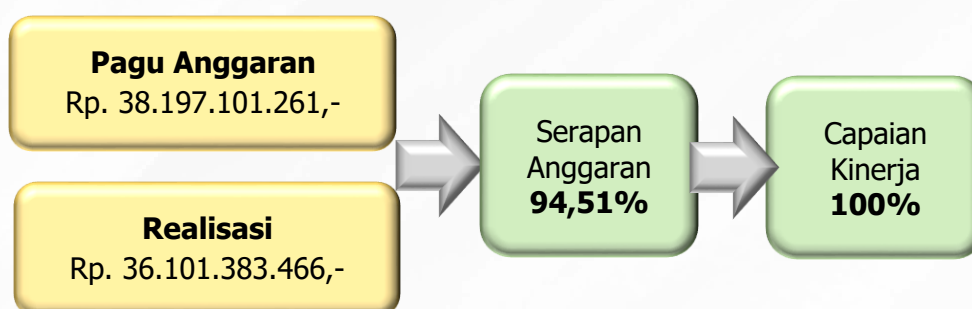
NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENJA PERUBAHAN		DPA PERUBAHAN	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	31.068.000	12 Paket	31.068.000
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	12 Paket	35.000.750	12 Paket	35.000.750
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 Laporan	188.100.000	1 Laporan	102.100.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	5.556.905.940	1 Laporan	5.624.353.000
<b>12</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan perlengkapan gedung kantor</b>	<b>100%</b>	<b>175.549.600</b>	<b>100%</b>	<b>293.430.853</b>
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	117 Unit	175.549.600	139 Unit	293.430.853
<b>13</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Layanan Jasa Penunjang perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>1.748.848.650</b>	<b>100%</b>	<b>1.888.004.650</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan	352.960.000	1 Laporan	352.960.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Laporan	66.675.000	1 Laporan	80.825.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	1.329.213.650	2 Laporan	1.454.219.650
<b>14</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>742.668.250</b>	<b>100%</b>	<b>963.995.250</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	14 Unit	493.938.000	19 Unit	417.168.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	325 Unit	27.800.000	330 Unit	37.800.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi Kantin dan Ruang Laktasi	2 Unit	220.930.250	2 Unit	509.027.250
<b>TOTAL</b>				<b>37.407.101.261</b>		<b>38.197.101.261</b>

## BAB III CAPAIAN KINERJA

### 3.1 Realisasi Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Anggaran Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2023

BAPPEDA Provinsi Lampung tahun 2023 melaksanakan 3 Program, 15 Kegiatan dan 57 Sub Kegiatan dalam mendukung target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Bappeda Tahun 2023. Anggaran belanja pada Perubahan APBD sebesar Rp. 38.197.101.261,- dengan total realisasi keuangan sebesar Rp. 36.101.383.466,- atau sebesar 94,51%.

Berdasarkan APBD Perubahan Tahun 2023, anggaran belanja terbagi dalam Sasaran Utama sebesar Rp. 8.429.073.710,- dan Sasaran Pendukung Rp. 29.768.027.551,-. Anggaran belanja yang mendukung tercapainya sasaran pendukung tersebut lebih besar dari pada anggaran belanja yang mendukung tercapainya sasaran utama. Hal ini disebabkan sasaran pendukung mengakomodir sub kegiatan belanja gaji ASN yang sebesar Rp. 18.895.712.516,- dan sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebesar Rp. 5.624.353.000,-.

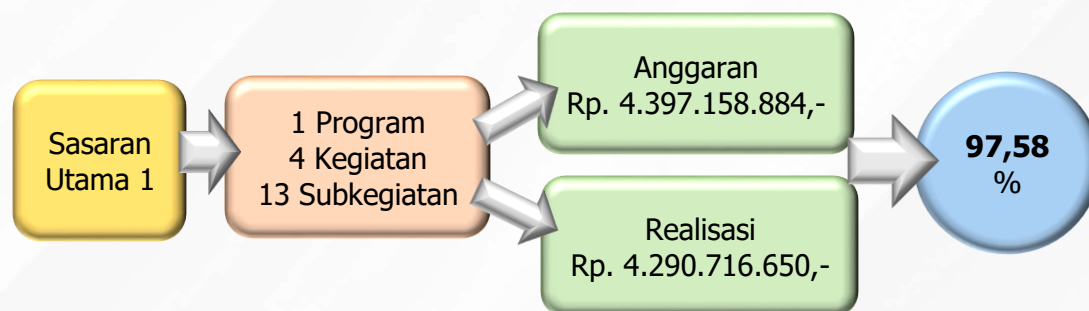


**Gambar 3.1 Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023**

Dari gambar diatas dijelaskan bahwa realisasi kinerja mencapai 100% dan realisasi anggaran mencapai 94,51%, termasuk dalam kategori sangat tinggi. Dari 57 sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Lampung pada Tahun 2023, seluruhnya mencapai realisasi kinerja 100%. Secara rinci capaian kinerja dan anggaran masing-masing sub kegiatan dapat dilihat dalam matriks evaluasi renja dalam lampiran dokumen evaluasi renja Tahun 2023 ini.

Penjelasan terkait tingkat capaian anggaran selama tahun 2023 sebagai berikut:

**Sasaran Utama 1 : Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah**



Sesuai dengan gambar diatas, untuk sasaran utama ke 1, dari pagu anggaran yang direncanakan semula sebesar Rp.4.397.158.884,- dapat terealisasi sebesar Rp.4.290.716.650,- atau sebesar 97,58%. Program yang mendukung Sasaran Utama I tersebut adalah Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, yang terdiri dari 4 Kegiatan dan 13 Sub Kegiatan dengan realisasi kinerja sebagai berikut :

**I. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**

1. Jumlah berita acara konsultasi publik dengan tingkat capaian 100 %;
2. Jumlah berita acara Musrenbang Provinsi dengan tingkat capaian 100%;
3. Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi (RKPD Murni dan Perubahan, Dokumen Teknokratis RPJMD 2025-2029, Dpkumen Rancangan Awal RPJPD 2025-2045) dengan tingkat capaian 100%.

**II. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**

1. Jumlah masukan analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan dengan tingkat capaian 100 %;
2. Jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi (75 Orang) dengan tingkat capaian 100%;

3. Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kab/Kota yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi pemerintahan daerah (60 Orang) dengan tingkat capaian 100%;
4. Jumlah Buku Profil pembangunan daerah yang diterbitkan dan Dokumen Satu Data Indonesia (SDI) dengan tingkat capaian 100%.

### **III. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**

1. Jumlah Laporan Dekon/TP/DAK dan Laporan Monitoring dengan tingkat capaian 100 %;
2. Jumlah Dokumen Evaluasi RPJMD 2019-2024, Evaluasi RKPD Tahun 2022 dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan APBD Tahun 2023 dengan tingkat capaian 100%;
3. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Musrenbang Kabupaten/Kota, Dokumen Hasil Fasilitasi RKPD Murni dan RKPD Perubahan Kab/Kota dengan tingkat capaian 100%.

### **IV. Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**

1. Jumlah Dokumen pengelolaan data pembangunan daerah dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan tingkat capaian 100 %;
2. Jumlah Dokumen hasil penerapan SIPD di bidang pembangunan daerah dengan tingkat capaian 100%;
3. Jumlah Dokumen hasil pembinaan sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah Pemerintah Provinsi dengan tingkat capaian 100%;



**Sasaran Utama 2 : Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.**



Sesuai dengan gambar diatas, untuk sasaran utama ke 2, dari pagu anggaran yang direncanakan semula sebesar Rp. 4.031.914.826,- dapat terealisasi sebesar Rp. 3.839.485.300,- atau sebesar 95,23% sementara untuk tingkat capaian kinerja mencapai 100%. Program yang mendukung Sasaran Utama 2 tersebut adalah Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, yang terdiri dari 3 Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan dengan realisasi kinerja sebagai berikut :

#### **V. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**

1. Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan (Dokumen hasil desk program strategis bidang GERMAS) dengan tingkat capaian 100%;
2. Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pemerintahan dan penyusunan laporan hasil desk program strategis bidang perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia bagian kemiskinan dan PPDT dengan tingkat capaian 100%;
3. Jumlah perangkat daerah yang dimonitoring dan dievaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pemerintahan dan penyusunan Laporan Capaian TPB/ SDGs Tahun 2022 Provinsi Lampung dengan tingkat capaian 100%;

4. Jumlah Laporan Sinergisitas Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat, Dokumen RPKD 2024-2029, Dokumen RAD SDGS 2024-2029, RAD Pangan Gizi 2024-2029 dengan tingkat capaian 100%;
5. Jumlah Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) kemiskinan 2024 dengan tingkat capaian 100%.
6. Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pembangunan Manusia dan penyusunan Laporan hasil desk program strategis bidang perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia pangan dan gizi dan stunting dengan tingkat capaian 100%;
7. Jumlah perangkat daerah yang dimonitoring dan dievaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pembangunan Manusia dan penyusunan Laporan perencanaan dan proceeding FGD dengan tingkat capaian 100%;
8. Jumlah Dokumen Profil Kemiskinan di 5 Kabupaten/ Kota Tahun 2022 dengan tingkat capaian 100%;

**VI. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**

1. Jumlah Buku Peluang Investasi dan Dokumen Perencanaan Perekonomian sektor penanaman modal, tenaga kerja, pendapatan, dan keuangan dengan tingkat capaian 100%;
2. Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Perekonomian dan Penyusunan Dokumen target indikator makro ekonomi Provinsi Lampung dengan tingkat capaian 100%;
3. Jumlah perangkat daerah yang mendapat monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Perekonomian dan penyusunan buku statistik perekonomian (tahunan n-1 dan triwulanan) dengan tingkat capaian 100%;

4. Jumlah Dokumen Laporan Kajian Dukungan Pembangunan Pariwisata dan UMKM di Provinsi Lampung dengan tingkat capaian 100%;
5. Jumlah Dokumen koordinasi perencanaan di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan dengan tingkat capaian 100%;
6. Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang SDA dan Penyusunan Dokumen asistensi pembangunan sektor Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan dengan tingkat capaian 100%;
7. Jumlah perangkat daerah yang mendapat monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang SDA dan penyusunan Laporan Monev dan Capaian Kinerja Perencanaan di sektor Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan, dan dokumen laporan hasil Rapat Koordinasi dan Implementasi KPB dengan tingkat capaian 100%.
8. Jumlah Dokumen Potensi dan pengembangan Pembangunan daerah sektor Pariwisata dengan tingkat capaian 100%.

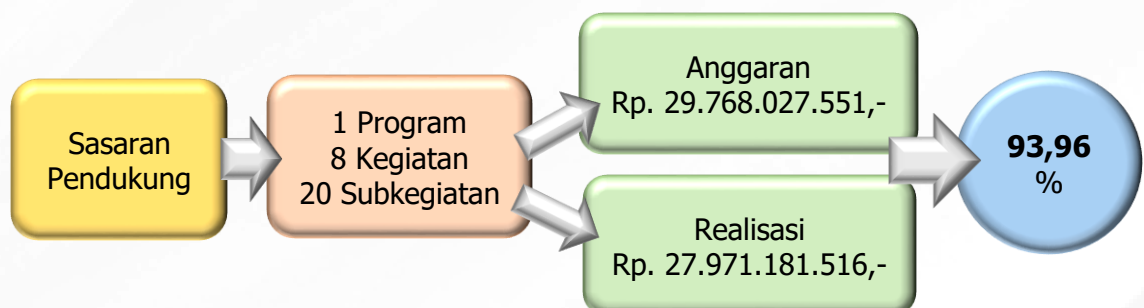
#### **VII. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**

1. Jumlah dokumen bidang perencanaan infrastruktur dan kewilayahan sektor ESDM dan perhubungan dengan tingkat capaian 100%;
2. Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Infrastruktur dan penyusunan dokumen Renja dan program prioritas perangkat daerah bidang sumber daya air, lingkungan hidup, kehutanan dan penanggulangan bencana dengan tingkat capaian 100%;
3. Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Infrastruktur dan penyusunan Laporan monitoring dan evaluasi serta capaian

kinerja perencanaan bidang infrastruktur dengan tingkat capaian 100%;

4. Jumlah dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dengan tingkat capaian 100%;
5. Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tahun 2023 dengan tingkat capaian 100%;
6. Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Kewilayahan dan penyusunan Dokumen Laporan Pelaksanaan Asistensi di Bidang Kewilayahan dengan tingkat capaian 100%;
7. Jumlah perangkat daerah yang mendapat monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Kewilayahan dan penyusunan Laporan Monev dan capaian kinerja perencanaan di Bidang Kewilayahan dengan tingkat capaian 100%;
8. Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Provinsi Lampung untuk sektor lahan, limbah dan energi dan Laporan Proceiding hasil pemeriksaan validasi Dokumen KLHS Kabupaten/Kota dan Pokja Pengendalian TKPRD Provinsi Lampung dengan tingkat capaian 100%.

**Sasaran Pendukung : Meningkatnya kapasitas dan kinerja instansi Bappeda.**



Sesuai dengan gambar diatas, untuk sasaran pendukung, dari pagu anggaran yang direncanakan semula sebesar Rp. 29.768.027.551,- dapat

terrealisasi sebesar Rp. 27.971.181.516,- atau sebesar 93,96%. Dari 20 sub kegiatan yang mendukung sasaran pendukung seluruhnya mencapai capaian kinerja 100%. Program yang mendukung Sasaran Pendukung tersebut adalah Program penunjang urusan pemerintah daerah, yang terdiri dari 8 Kegiatan dan 20 Sub Kegiatan dengan realisasi kinerja sebagai berikut :

#### **VIII. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

1. Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renja Murni (n+1), Renja Perubahan (Tahun n), RKT, PK Murni, PK Perubahan, Rencana Aksi, GAP dan GBS, RKA Murni, RKA Perubahan, DPA Murni dan DPA Perubahan) dengan tingkat capaian 100%;
2. Jumlah laporan dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan Kinerja/LKj Tahun 2022, Ev. Rencana Aksi Tahun 2022, Evaluasi Renja Tahun 2022, Evaluasi Renja Tahun 2023 Triwulan I,II, II) dengan tingkat capaian 100%.

#### **IX. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

1. Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN dengan tingkat capaian 100%;
2. Jumlah laporan keuangan semesteran dan tahunan SKPD dengan tingkat capaian 100%.

#### **IX. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

1. Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD (Laporan RKBU, RKBU rekon semester I, RKBU rekon semester II) dengan tingkat capaian 100%

#### **X. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

1. Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan dengan tingkat capaian 100%;
2. Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan tingkat capaian 100%.

#### **XI. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

1. Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan dengan tingkat capaian 100%;
2. Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan dengan tingkat capaian 100%;
3. Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan dengan tingkat capaian 100%;
4. Jumlah paket bahan/material yang disediakan dengan tingkat capaian 100%;
5. Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu dengan tingkat capaian 100%;
6. Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan tingkat capaian 100%.

#### **XII. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan dengan tingkat capaian 100%.

#### **XIII. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1. Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan dengan tingkat capaian 100%;
2. Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan dengan tingkat capaian 100%;
3. Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan dengan tingkat capaian 100%.

#### XIV. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya dengan tingkat capaian 100%;
2. Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dengan tingkat capaian 100%;
3. Jumlah pemeliharaan kantin, ruang laktasi dan lahan parkir dengan tingkat capaian 100%.

#### 3.2 Capaian Kinerja IKU Bappeda (Sasaran Renstra) Tahun 2023

Berdasarkan Renstra Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, terdapat 5 (lima) indikator kinerja utama (IKU) dan 1 (satu) indikator kinerja pendukung. Adapun tingkat capaian dan realisasi indikator kinerja utama Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Capaian IKU BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	%	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>SASARAN UTAMA</b>						
I	Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah;	Penetapan RKPD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	Penetapan RKPD Tahun 2024 sesuai target yang ditetapkan.
		Persentase Usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD;	31%	48,3%	100%	Diukur berdasarkan usulan pokok-pokok pikiran DPRD dan usulan kab/kota yang diakomodir dalam RKPD Tahun 2024 sebanyak 732 usulan dari 1.516 total usulan.
II	Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.	Persentase PD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD;	100 %	100%	100%	Target telah dicapai dimana indikator sasaran Renstra PD telah selaras dengan indikator sasaran pada Perubahan RPJMD 2019-2024 mengingat antara RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja telah terintegrasi dalam aplikasi SIPPKD.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	%	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Persentase PD yang indikator sasaran Renja nya selaras dengan indikator sasaran RKPD;	100 %	100 %	100%	Target telah dicapai dimana indikator sasaran Renja PD telah selaras dengan indikator sasaran pada RKPD mengingat antara RKPD dan Renja telah terintegrasi dalam aplikasi SIPPKD.
		Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai.	95%	95%	100%	Terdapat 19 indikator dari 20 Indikator sasaran RPJMD yang capaiannya diatas 95%.
<b>SASARAN PENDUKUNG</b>						
I	Meningkatnya kapasitas dan kinerja instansi BAPPEDA	Nilai SAKIP BAPPEDA	A	A	100%	Berdasarkan LHE Inspektorat pada Bulan Juni 2023, Bappeda Provinsi Lampung berhasil mencapai nilai mutu A.

Dari 5 indikator kinerja utama yang telah ditetapkan oleh BAPPEDA Provinsi Lampung, di Tahun 2023 sebanyak 5 indikator telah mencapai target kinerja 100%. Sementara 1 indikator pendukung telah mencapai kinerja 100%. Analisis terhadap pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

**1. Sasaran Utama 1 : Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah**

Proses perencanaan Pembangunan Provinsi Lampung yang telah dilakukan meliputi : Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, FGD, Pelaksanaan Konsultasi Publik, Pelaksanaan Desk Rakortekrenbang, Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi, Fasilitasi dan evaluasi Kabupaten/Kota, Pelaksanaan Desk Musrenbang Provinsi Lampung, Temu konsultasi Bappenas dan Bappeda Provinsi se-Indonesia, Desk pencermatan dan pembahasan usulan pikir DPRD, desk pembahasan renja. Indikator kinerja sasaran 1 ini terdapat 2 indikator sasaran yaitu :



1. Penetapan RKPD Tepat Waktu dengan target kinerja adalah tepat waktu;
2. Persentase usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD dengan target kinerja sebesar 31%;

**Indikator sasaran 1.a** adalah “**Penetapan RKPD Tepat Waktu**” dengan target kinerja adalah tepat waktu. Indikator ini dicapai melalui penetapan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024 sesuai target yang ditetapkan yaitu pada Bulan Juni Tahun 2023.

Pencapaian indikator sasaran “penetapan RKPD Tepat Waktu” dengan target 100% merupakan suatu pencapaian kinerja BAPPEDA Provinsi Lampung dalam bidang perencanaan pembangunan mengingat kompleksitasnya tahapan dalam penyusunan RKPD. Pencapaian target indikator ini secara konsisten diraih sejak tahun pertama periode RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.



**Indikator sasaran 1.b** adalah “**Persentase usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD**” dengan target kinerja pada Tahun 2023 sebesar 31%. Adapun realisasinya adalah sebesar 48,3% atau dengan persentase terhadap target sebesar 100%. Usulan stakeholder ini diakomodir dalam aplikasi E-RKPD BAPPEDA Provinsi Lampung. Yang menjadi usulan tersebut dibagi menjadi 2 bagian antara lain : 1) Usulan Masyarakat yang dikelompokkan dalam usulan Kabupaten/Kota; dan 2) Usulan Pokir DPRD.



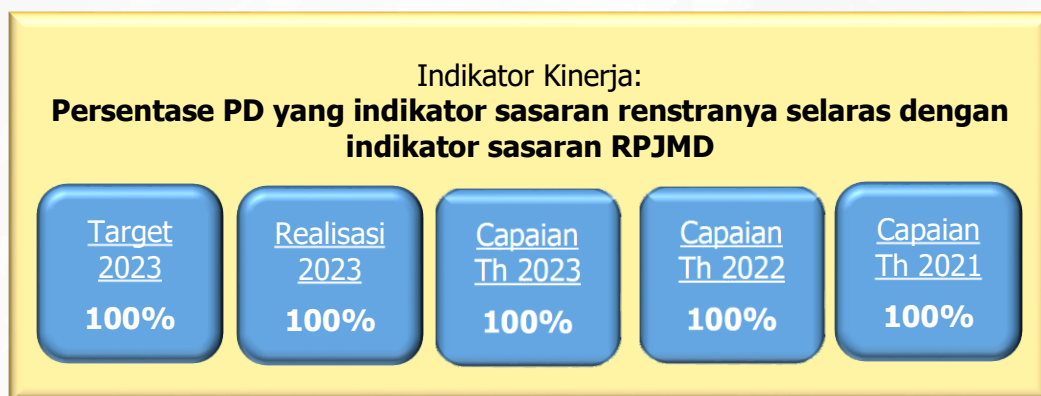
Terdapat sebanyak 1.516 total usulan yang terdiri dari 998 usulan pokok-pokok pikiran DPRD dan 518 usulan masyarakat yang dikelompokkan dalam usulan Kabupaten/Kota. Dari 1.516 total usulan tersebut, sebanyak 732 usulan yang diakomodir dalam RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024, yang terdiri dari 432 usulan pokok-pokok pikiran DPRD dan 300 usulan masyarakat yang dikelompokkan dalam usulan Kabupaten/Kota. Sisanya ditolak yakni sebanyak 784 usulan atau 51,27% dari total usulan.

**2. Sasaran Utama 2 : Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.**

Proses implementasi mulai dari perencanaan, monitoring serta evaluasi dimasing-masing sektor yaitu ekonomi, pembangunan manusia dan infrastruktur dalam pembangunan Provinsi Lampung. Indikator kinerja sasaran 2 ini terdapat 3 indikator sasaran yaitu :

1. Persentase PD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD dengan target kinerja sebesar 100%;
2. Persentase PD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD dengan target kinerja sebesar 100%;
3. Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai dengan target kinerja sebesar 95%.

**Indikator sasaran 2.a** adalah “**Persentase Perangkat Daerah yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD**” dengan target kinerja sebesar 100%. Adapun realisasinya adalah sebesar 100% atau dengan persentase terhadap target sebesar 100%. Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, mendorong seluruh Perangkat Daerah sudah selaras indikator Renstranya terhadap RPJMD. Selain itu, dalam menjaga keselarasan RPJMD dan Renstra dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD).



Diawali dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3778 Tahun 2020 selanjutnya dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021, maka keselarasan indikator RPJMD dan indikator Renstra Perangkat Daerah dapat dapat lebih mudah untuk diimplementasikan sehingga capaian indikator ini dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

**Indikator sasaran 2.b** adalah “**Persentase Perangkat Daerah yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD**” dengan target kinerja sebesar 100%. Adapun realisasinya adalah sebesar 100% atau dengan persentase terhadap target sebesar 100%.



Sejalan dengan capaian indikator kinerja Persentase PD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD yang sudah mencapai persentase 100%, diikuti dengan capaian indikator persentase PD yang sasaran renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD juga mencapai target capaian yang telah ditetapkan. Hal ini tidak lain dapat dicapai dengan dikeluarkannya keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, indikator renja perangkat daerah telah diakomodir dan ditentukan sehingga tidak ada lagi indikator Renja Perangkat Daerah yang diluar dari surat keputusan tersebut.

**Indikator sasaran 2.c** adalah “**Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai**” dengan target kinerja sebesar 95% atau sebanyak 19 indikator dari 20 indikator yang ditargetkan akan mencapai target. Adapun realisasi nya pada Tahun 2023 adalah 95% dimana sebanyak 19 indikator dari 20 indikator yang capaiannya diatas 95%, meskipun secara rata-rata capaian IKU sasaran RPJMD mencapai 91,37% dengan kategori sangat tinggi. Dengan demikian tingkat capaian IKU “Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai” adalah sebesar 100%, yakni realisasi Tahun 2023 sebesar 95% dibandingkan dengan target kinerja Tahun 2023 sebesar 95%.

Capaian IKU tersebut meningkat dari tahun sebelumnya, dimana pada Tahun 2021 tingkat capaiannya sebesar 100% dan pada Tahun 2022 sebesar 94,44%. Tingkat capaian IKU “Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai” pada Tahun 2022 adalah sebesar 94,44%, yakni realisasi Tahun 2022 sebesar 85% dimana ada 17 indikator yang capaiannya melebihi 95%,

dibandingkan dengan target kinerja Tahun 2022 sebesar 90%. Sementara tingkat capaian IKU “Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai” pada Tahun 2021 adalah sebesar 100%, yakni realisasi Tahun 2021 sebesar 95% dimana 19 indikator dari 20 indikator yang capaiannya melebihi 95%, dibandingkan dengan target kinerja Tahun 2021 sebesar 85%.

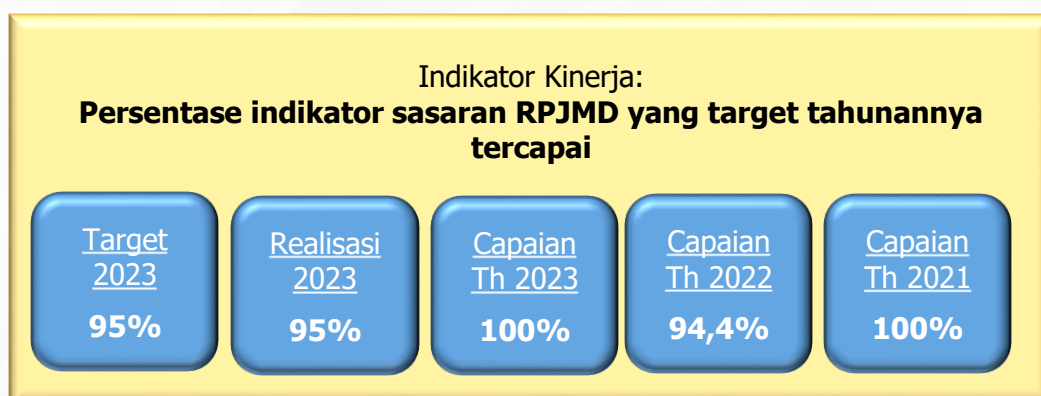
**Tabel 3.2 Capaian Indikator Sasaran (IKU) RPJMD**

NO	IKU	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Misi 1: Menciptakan Kehidupan Yang Religius (Agamis). Berbudaya. Aman. Dan Damai										
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	73,3	72,44	98,83	73,5	72,07	98,1	73,7	72,07	97,8 *)
2	Indeks Demokrasi Indonesia	73	72,79	99,71	74	80,18	108	75	80,18	107 *)
3	Indeks Pembangunan Kebudayaan	54,8	55,38	101,06	55,3	53,19	98,18	55,8	53,19	95,32 *)
Misi 2: Mewujudkan “Good Governance” Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Publik										
4	Nilai Reformasi Birokrasi	B	CC	97,3	B	CC	90,64	B	CC	98,27 *)
Misi 3: Meningkatkan Kualitas SDM. Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak. Pemberdayaan Perempuan. dan Penyandang Disabilitas										
5	Angka Harapan Hidup	70,8	70,73	99,90	70,95	70,99	100,06	71,2	74,17	104,17
6	Harapan Lama Sekolah	12,66	12,73	101	12,67	12,74	100,55	12,68	12,77	100,71
7	Rata-rata Lama Sekolah	8,10	8,08	99,75	8,2	8,18	99,76	8,3	8,29	99,88
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	4-4,5	4,69	95,78	4,3-4,4	4,52	97,27	4,0-4,3	4,23	101,63
9	Indeks Perlindungan Anak	67,66	-	-	69,57	65,07	93,53	71,37	65,07	91,17
10	Indeks Pemberdayaan Gender	69,10	67,96	98,35	69,14	67,96	98,29	69,18	68,24	98,64
Misi 4: Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah										
11	Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	74	75,38	101,87	76	76,85	101,12	77	79,29	102,97
12	Tingkat Infrastruktur Dasar Wilayah	91,20	91,22	100,02	92,31	96,5	104,54	93,01	93,74	100,78
13	Rasio Elektrifikasi RumahTangga	96	99,94	104,1	97	99,99	103,08	98	99,99	102,03
Misi 5: Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan										

NO	IKU	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
14	Laju Pertumbuhan Ekonomi	2,5-3,5	2,79	111,6	3-4	4,28	142,67	3,5-4,5	4,27	122
15	Nilai Tukar Petani	101-102	101,23	100,23	102-103	104,3	102,25	104-105	109,25	105,05
16	Laju Inflasi	3±1	2,19	127	3±1	5,51	62,25	3±1	3,45	113,75
17	Angka Kemiskinan	12,76-12,4	11,67	108,54	12,4-11,9	11,44	107,74	11,9-11,4	11,11	102,88
Misi 6: Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama										
18	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,23	68,56	100,48	68,66	69,1	100,64	69,09	69,91	101,19
19	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	6,74	6,74	100	6,915	12,84	186	7,066	12,84	181,72 *)
20	Indeks Resiko Bencana	142,9	145,42	98,24	141	142,55	98,90	139,1	142,55	97,52 *)
<b>RATA-RATA CAPAIAN</b>				<b>97,19</b>			<b>97,14</b>			<b>91,37</b>

\*) Data belum released sampai dengan akhir tahun 2023

Upaya peningkatan kinerja terhadap indikator ini telah dilakukan oleh BAPPEDA dengan didampingi oleh PD terkait (Inspektorat dan Biro Organisasi) bersinergi untuk melakukan evaluasi capaian kinerja kepada Perangkat Daerah yang menjadi pengampu Indikator Kinerja Kepala Daerah dan melakukan penyesuaian jumlah dari target indikator kinerja perangkat daerah dengan kemampuan fiskal daerah.



Namun demikian, data capaian IKU “Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai” pada Tahun 2023 tersebut masih bisa berubah. Hal ini dikarenakan masih ada beberapa data realisasi capaian IKU tersebut yang

belum release sampai dengan akhir Tahun 2023 sehingga dalam mengukur ketercapaian IKU tersebut masih menggunakan data realisasi Tahun 2022.

**3. Sasaran Pendukung : Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah.**

Selain indikator sasaran utama, indikator sasaran pendukung juga diperlukan dalam hal mengukur penyediaan sarana dan prasarana rutin kantor, persentase kehadiran pegawai BAPPEDA dalam 1 tahun, Penyusunan laporan perencanaan, evaluasi, keuangan serta asset sebagai penunjang kinerja sasaran utama. Target indikator ini merupakan nilai SAKIP yang dicapai pada tahun 2023 berdasarkan hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat dengan Tahun Penilaian 2022. Target yang ditetapkan yaitu predikat “BB”. Adapun realisasi kinerjanya telah melampaui target yaitu BAPPEDA memperoleh predikat SAKIP “A” berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dari Inspektorat yang diberikan ke masing-masing PD pada Bulan Juni Tahun 2023.



SAKIP mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi serta mendisain program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan. Dengan diraihnya predikat “A” oleh BAPPEDA mengindikasikan bahwa tata Kelola pemerintahan di BAPPEDA Provinsi Lampung telah berjalan dengan sangat baik dan memuaskan.

## **BAB IV**

# **PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI**

### **4.1 FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA**

Tingkat capaian kinerja Bappeda Provinsi Lampung pada Tahun 2023 mencapai 100%. Hal ini menunjukkan tidak ada hambatan dan kendala yang berarti bagi Bappeda dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Meskipun tingkat capaian kinerja sudah mencapai 100%, namun jika dilihat dari sisi serapan anggaran, pada Tahun 2023 tingkat serapan anggaran Bappeda Provinsi Lampung hanya 94,51% atau dengan kata lain masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp.2.095.717.795,- atau 5,49%. Sisa anggaran tertinggi terdapat pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan sebesar Rp.950.802.086,- dan sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebesar Rp.612.509.690,-.

Faktor yang menjadi permasalahan dalam pencapaian serapan anggaran yang tidak sejalan dengan tingginya tingkat capaian kinerja tersebut disebabkan adanya proses penetapan DPA Perubahan yang membutuhkan waktu panjang, sehingga waktu untuk pelaksanaan kegiatan sangat sempit dan hal ini mempengaruhi realisasi keuangan. Disamping itu, adanya pelantikan Kepala Bappeda sebagai Pj. Bupati Tanggamus pada bulan September Tahun 2023 juga menyebabkan penyerapan anggaran untuk sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD tidak optimal. Hal ini disebabkan intensitas kegiatan Kepala Bappeda Provinsi Lampung lebih banyak dilakukan di Kabupaten Tanggamus.

### **4.2 FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA**

Beberapa faktor yang menjadi pendorong tercapainya target kinerja:

- a. Keberhasilan dalam pencapaian sasaran strategis peningkatan kualitas substansi dan implementasi perencanaan pembangunan daerah didukung oleh penggunaan sistem aplikasi SIPPKD dalam proses perencanaan dan penganggaran. Penggunaan aplikasi



- tersebut memungkinkan untuk menjaga keselarasan indikator sasaran antara RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja.
- b. Penerapan standar satuan harga (SSH) dan analisis standar biaya (ASB) yang menjadi dasar penyusunan dan penentuan nilai belanja memudahkan dalam proses perencanaan.
  - c. Terbitnya Kepmendagri nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Kalsifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah, mempermudah dalam melakukan pengukuran kinerja dan mewujudkan keselarasan antara perencanaan dan penganggaran.

#### **4.3 REKOMENDASI KEBIJAKAN**

- a. Proses perencanaan sampai dengan penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan harus mengacu pada tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
- b. Dokumen evaluasi hendaknya menjadi acuan dalam menyusun dokumen Renja Tahun  $n+1$ . Begitu juga dengan penyusunan anggaran perubahan hendaknya dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi sampai dengan triwulan II tahun berjalan.
- c. Dalam rangka mengoptimalkan capaian target dari pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan maka setiap pengelola kegiatan harus mengacu pada Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), serta Rencana Operasional Kegiatan (ROK) dan Rencana Arus Kas (RAK) yang telah disusun.

## **BAB V PENUTUP**

Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Lampung Tahun 2023 merupakan perwujudan pertanggungjawaban Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Pasal 259.

Pada Tahun 2023, BAPPEDA Provinsi Lampung melaksanakan 3 Program, 15 Kegiatan dan 57 Sub Kegiatan dengan total anggaran belanja pada Perubahan APBD sebesar Rp. 38.197.101.261,-. Anggaran tersebut terbagi ke dalam sasaran utama dengan 5 indikator sasaran (IKU) dan sasaran pendukung.

Secara umum dapat disampaikan bahwa pada Tahun 2023, tingkat capaian kinerja BAPPEDA Provinsi Lampung mencapai 100%, sementara tingkat serapan anggaran mencapai 94,51%. Masih terdapat beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang realisasi keuangannya belum optimal dikarenakan tidak tersedianya waktu yang cukup untuk melaksanakan kegiatan setelah adanya perubahan anggaran.